

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik saudara yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok dengan Taiwan sudah menjadi isu internasional yang menyebabkan status Taiwan tidak dalam bentuk sebuah negara, didukung oleh PBB yang tercakup dalam Resolusi 2758. Dengan status tersebut membuat kapasitas Taiwan terbatas dalam melakukan diplomasi. Konflik yang semakin memanas dikarenakan tidak adanya tanda-tanda Taiwan dalam menerima prinsip satu Tiongkok. Kemudian ikut mendorong terbentuknya *Anti-Cessation Law* Tiongkok yang disahkan pada 2005 yang bertujuan membahas tindakan apa yang harus diberikan pada Taiwan (L.Hsieh, 2009).

Dalam pandangan integrasi ekonomi cenderung akan menciptakan aktor yang memiliki ketergantungan kepada aktor lain, sehingga dapat memainkan kepentingan dalam tawar-menawar untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Dengan demikian pandangan integrasi ekonomi inilah yang dirasa diterapkan Tiongkok pada Taiwan. Dalam sebuah pertemuan membahas negaranya dengan Taiwan Hu Jintao Presiden Tiongkok mengatakan “ *we will make every effort with utmost sincerity to achieve a peaceful reunification of the country*” (Sobiegalla & Fleischauer, 2017). Dalam pernyataan tersebut kita dapat melihat bahwa usaha penyatuan akan berusaha dilakukan pada jalur yang damai seperti kerja sama ekonomi walaupun dalam masalah Taiwan Tiongkok juga menggunakan kekuatan militer.

Dalam melihat usaha ekonomi Tiongkok dapat diperhatikan dalam kebijakan domestiknya untuk menarik Taiwan, seperti dengan adanya jaminan untuk perlindungan modal asing yang ditanamkan oleh investor Taiwan. Terdapat juga insentif khusus seperti adanya pajak *corporate income tax holiday* yang begitu rendah. Hal ini juga diikuti oleh *preferential treatment* yang diberikan khusus hanya untuk investor Taiwan agar perusahaan negara tersebut tertarik untuk menanamkan modal. Pada 2005 terdapat 70 persen penanaman modal asing Taiwan memilih Tiongkok sebagai tempat untuk penanaman modal dan terdapat 70.000 perusahaan Taiwan yang telah beroperasi di Tiongkok pada tahun tersebut. Banyak perusahaan Taiwan yang sudah menikmati kebijakan ini termasuk produk pertanian seperti hambatan tarif dan impor yang dikurangi (Mahadeli, 2008).

The Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi antar selat Tiongkok dan Taiwan, dengan tujuan Taiwan untuk mengatasi krisis pada 2008. Dengan prediksi keuntungan yang dapat meningkatkan PDB sebanyak 1,65-1,72 persen serta 2,6 persen perkembangan dalam industri serta investasi dalam 40 sektor ekonomi Taiwan kepada Tiongkok. Namun dilain sisi Tiongkok melihat ini adalah suatu peluang dalam menarik kerja sama yang lebih erat sehingga memungkinkan Tiongkok semakin lama masuk kedalam internal Taiwan yang mengakibatkan prinsip satu Tiongkok dapat terwujud (Lee & Yi, 2017).

Dalam pandangan Taiwan, Tiongkok memiliki perdagangan murah seperti dari aspek tenaga kerja yang dapat menghasilkan komponen elektronik industri

dalam mendukung produktivitas perusahaan elektronik Taiwan. Keterbukaan Taiwan terhadap Tiongkok didukung oleh pandangan baru pemerintah Taiwan yang melihat bahwa untuk berkembang perlu adanya liberalisasi pasar dan keterbukaan (Meltzer, 2014). Hal ini sesuai dengan argumen presiden Taiwan Tsai Ing-Wen yang mengatakan bahwa harus ada langkah baru dalam hubungan Tiongkok dan Taiwan walaupun tidak dalam integrasi wilayah (VOA Indonesia, 2017).

Tiongkok menjadikan pandangan baru pemerintah Taiwan tersebut yang begitu terbuka akan ekonomi sebagai batu loncatan kerja sama dengan tujuan untuk membuat Taiwan bergantung pada negaranya. Strategi ini sekaligus untuk membuat masyarakat Taiwan cenderung tidak mementingkan kemerdekaan lagi. Adapun secara garis besar yang dilakukan Tiongkok diluar jalur pemaksaan militer adalah mendorong untuk adanya integrasi ekonomi yang dapat mendorong pemersatuan, dengan berusaha berperan dalam politik domestik Taiwan (Niou, 2011).

Tiongkok memanfaatkan kelemahan pemerintah Taiwan yang tidak dapat mengontrol pengusaha-pengusaha yang ingin memiliki hubungan ekonomi dengan Tiongkok, sehingga perdagangan tidak langsung sangat sering terjadi. Presiden yang pernah menjabat Jing Zemin juga pernah melakukan negosiasi tingkat tinggi untuk keberlangsungan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Taiwan. Dari hubungan keduanya yang meningkat secara signifikan membuktikan bahwa strategi ekonomi dalam memenangkan hati Taiwan untuk pemersatuan perlahan benar-benar terimplementasi dengan baik (Chen, 2003).

Keberhasilan lain Tiongkok dalam mengikat Taiwan adalah adanya perdagangan Taiwan dengan ekspor yang tumbuh sebanyak 37,1 persen pada 2010 dengan nominal USD 114,78 miliar yang sebelumnya pada 2009 hanya sebesar USD 50 miliar, yang secara garis besar ekspor ini merupakan 41,8 persen dari ekspor keseluruhan Taiwan. Oleh karena itu dikatakan bahwa tidak mungkin Tiongkok bersedia memberikan keuntungan secara percuma kepada Taiwan jika tidak memiliki motif lain, terdapat penafsiran bahwa ini adalah motif politik penyatuan wilayah. Kerja sama keduanya dapat diamati pada ECFA yang ditanda-tangani pada 2010 dengan isi adanya pemotongan tarif pada 539 produk ekspor Taiwan ke Tiongkok, tujuan ECFA yaitu adanya liberalisasi perdagangan, sebagai fasilitas perdagangan dan investasi, disisi lain terdapat tujuan paralel Tiongkok yaitu menyatukan kawasan dengan integrasi ekonomi lewat jalur ECFA (Niou, 2011).

Tujuan Tiongkok membentuk ketergantungan Taiwan didukung oleh daya tarik Tiongkok dalam ekonomi yang tidak terelakan, yang pada 2001 Tiongkok menggantikan Amerika Serikat sebagai mitra perdagangan utama untuk ekspor ke Taiwan. Hubungan yang makin erat dilihat akan memunculkan kampanye reunifikasi Tiongkok yang dibentuk oleh Deng Xiaoping, reunifikasi ini berupa *One China Two System* (Lee, 2011). *One China Two System* merupakan keadaan di mana Taiwan diberikan otonomi khusus dalam menjalankan sistemnya sendiri yaitu ekonomi kapitalis sedangkan Tiongkok dengan ekonomi sosialis, Tiongkok meyakini tidak akan ikut campur dalam urusan lokal Taiwan jika telah menerapkan *One China Two System* (Ministry of Foreign Affairs of the People's

Republic of China, 2014). Selain itu Tiongkok mengambil peluang dengan memanfaatkan kondisi Taiwan dalam *Global Financial Crisis* (GFC), sekaligus menjadi diplomasi jangka panjang yang dirasa efektif karena Taiwan sama sekali tidak mengalami perubahan setelah adanya tindakan militer, yang membuat Tiongkok justru berpikir tentang alternatif lainnya seperti tindakan ekonomi.

Penelitian akan berfokus pada tahun 2010, mengingat pada tahun tersebut Tiongkok secara terbuka menyatakan mengakhiri perseteruan militernya dengan Taiwan dan mengarahkan usahanya pada konsep *Mutual Trust* di bidang politik baik dalam masalah transportasi, kerja sama ekonomi dan finansial diantara negaranya dengan Taiwan. Pernyataan ini disampaikan Tiongkok dalam *China's National Defense 2010* (Prasetya, 2012).

Dari *White Paper "China's National Defence 2010"* tersebut kita dapat melihat gambaran bahwa prinsip satu Tiongkok ingin diraih negaranya dengan pendekatan damai hubungan lintas selat yang dikatakan Tiongkok sebagai langkah baru, dengan meningkatkan kerja sama yang pragmatis sebagai bentuk memelihara perdamaian dengan Taiwan. Tiongkok sekaligus menuliskan bahwa cara damai yang ia gunakan mendapatkan sambutan hangat masyarakat internasional sehingga memunculkan *win-win*. Dari banyaknya fokus utama Tiongkok dalam *White Paper* ini pembahasan Taiwan masuk kedalam dua poin penting yaitu 1) *Security Situation* yang ditekankan Tiongkok sangat berfokus pada perdamaian, pembangunan dan kerja sama. Pemerintahnya menyatakan menerapkan prinsip serta kebijakan hubungan lintas selat termasuk dengan

Taiwan dalam situasi baru yang sekaligus menolak kemerdekaan Taiwan dan mengikuti konsensus 1992 atau prinsip satu Tiongkok yang menjadi dasar peningkatan politik saling percaya, melakukan konsultasi, perdagangan langsung dan bilateral serta promosi kerja sama ekonomi dan keuangan. Tiongkok juga ikut menekankan bahwa keinginan Taiwan memisahkan diri masih menjadi tuntutan yang berat untuk negaranya.

Selain itu pembahasan Taiwan juga masuk kedalam pembahasan 2) *National Defense Policy* dalam pembahasan ini Tiongkok berusaha mempertahankan prinsip hidup yaitu berdampingan secara damai dan budaya yang menjunjung perdamaian diatas segalanya. Namun tetap berhati-hati dalam masalah militer dan keamanan serta menganut prinsip "*attacking only after being attacked*" namun dikatakan Tiongkok tidak akan melakukan ekspansi militer sekarang atau dimasa depan begitu juga dalam masalah Taiwan. Dari *China's National Defence* 2010 itulah yang dijadikan dasar penelitian bahwa alternatif Tiongkok berubah dari operasi Militer ke jalur damai yaitu kerja sama ekonomi antar selat untuk masalah Taiwan (Ministry of National Defence, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai usaha ekonomi Tiongkok pada Taiwan, sehingga permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana upaya Republik Rakyat Tiongkok dalam memfokuskan kerja sama ekonomi antar selat dalam mendorong prinsip satu Tiongkok dalam penyatuan wilayah dengan Taiwan tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Tiongkok dalam memfokuskan kerja sama ekonomi sebagai usaha pemersatu negaranya dengan Taiwan yang merupakan wilayah yang dianggap sebagai teritorial Tiongkok. Rumusan masalah tersebut akan dianalisis dengan menggunakan konsep *Decision Making Process* yang berfokus pada pendekatan *Rational Actor Models* dalam menganalisis tindakan yang dilakukan oleh suatu aktor dalam hubungan internasional. Konsep ini sekiranya digunakan untuk melihat pertimbangan apa yang terdapat didalam internal Tiongkok sebagai negara yang melakukan upaya terhadap Taiwan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Pada saat ini prinsip satu Tiongkok belum terwujud, maka dari itu Tiongkok melakukan banyak upaya sebagai bentuk pentingnya Taiwan untuk negaranya, salah satunya dalam bentuk ekonomi baik sebagai tempat pengusaha Taiwan mendirikan perusahaan dengan insentif khusus, maupun sebagai mitra perdagangan Taiwan yang penting. Upaya ekonomi Tiongkok merupakan diplomasi damai terhadap Taiwan sekaligus bernegosiasi dalam prinsip satu Tiongkok sebagai syarat untuk melanjutkan kerja sama. Dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan jumlah nominal yang meningkat dapat dijadikan sebagai bentuk tolak ukur, bahwa prinsip satu Tiongkok akan terwujud.

Oleh karena itu dalam penelitian ini menjadikan kajian paling penting adalah analisis bagaimana upaya Tiongkok dalam memfokuskan jalur ekonomi

dalam mendorong prinsip satu Tiongkok untuk masalah wilayah Taiwan .Dengan menggunakan konsep *Rational Actor models* untuk melihat keuntungan dan kerugian apa saja yang dipertimbangkan Tiongkok sehingga melakukan banyak upaya dalam bidang ekonomi.

1.5 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini akan berfokus pada bidang ekonomi mengingat pada tahun 2010 Tiongkok berfokus pada hal tersebut. Tahun 2010 tersebut merupakan patokan awal Tiongkok memilih kerja sama ekonomi sebagai alternatif atas Taiwan. Maka dalam penelitian ini akan ikut dibahas proses sebelum tahun tersebut, pada 2005 lalu keduanya masih dalam konflik militer ketika Tiongkok menerbitkan undang-undang ancaman militer untuk Taiwan (Samosir, 2015). Konflik ini diakhiri Tiongkok pada 2010 diikuti dengan memberikan pernyataan bahwa tidak ingin melanjutkan konflik dengan jalur militer melainkan ingin membentuk hubungan perdagangan yang erat (Prasetya, 2012). Pernyataan 2010 tersebut yang kemudian dijadikan penulis sebagai dasar penelitian.

Ruang lingkup penelitian berfokus pada kerja sama antar selat. Dengan demikian penulis dapat melihat kebijakan secara langsung yang diberikan oleh Tiongkok kepada Taiwan baik itu kebijakan investasi, regulasi khusus serta kebijakan lain antar selat dalam ekonomi yang mengarah kepada usaha Tiongkok dalam mencapai prinsip satu Tiongkok.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dari rumitnya hubungan antara keduanya, upaya ekonomi yang dilakukan Tiongkok melewati banyak jalur diranah ekonomi baik investasi, perdagangan maupun usaha dalam forum tertentu. Maka dari itu penulis dalam tinjauan pustaka ini mencoba memaparkan beberapa data pendukung yang bersumber dari karya tulis ilmiah. Hal ini sekiranya dapat menggambarkan usaha serta bagaimana upaya Tiongkok dalam memfokuskan jalur ekonomi dalam mencapai prinsip satu Tiongkok.

Dalam jurnal yang berjudul *The Economic Integration of Taiwan and China and Its Implications for Cross-strait Relations* yang ditulis oleh Chen. Dengan adanya *Nasional people's Congress* (NPC) di mana Tiongkok mengajak Taiwan untuk menciptakan perdagangan serta transportasi antar selat. Banyak pengusaha Taiwan melihat Tiongkok sebagai tempat yang menjanjikan karena lokasi serta tenaga kerjanya yang murah serta adanya penawaran insentif khusus untuk investasi ekspor industri, akan tetapi usaha ini hanya sebuah strategi. Acuan Tiongkok dalam hubungan ekonomi keduanya adalah prinsip satu Tiongkok yang sering mengakibatkan hubungan keduanya terhambat (Chen, 2003).

Jurnal tersebut cenderung membahas bagaimana sekiranya hubungan Tiongkok dan Taiwan pada ruang lingkup antar selat. Serta berfokus pada masa pemerintahan presiden Taiwan Chen Shui Bian yang menjabat pada tahun 2000 yang merupakan seorang pemimpin Taiwan yang begitu pro-terhadap Tiongkok.

Dalam jurnal tersebut cenderung melihat perspektif dari Taiwan sedangkan dalam penelitian ini akan melihat perspektif dari Tiongkok.

Dalam jurnal *Why Does So Much FDI from Hong Kong and Taiwan Go to Mainland China*. Terdapat argumen bahwa penarikan investor Tiongkok memberikan insentif khusus bagi para pengusaha Taiwan salah satunya adalah *Tax Holiday* serta biaya sewa lahan yang terjangkau. Hal ini menjadikan Tiongkok lebih menarik, selain itu juga didukung dengan adanya dana yang sangat besar yang akan diberikan kepada investor Taiwan jika ingin meminjam dana yang langsung dijamin oleh Bank Pembangunan Tiongkok (Zhang, 2005).

Dalam jurnal tersebut menjelaskan secara jelas mengapa Taiwan dan Hongkong memilih Tiongkok dalam melakukan kerja sama. Pembahasan jurnal dititik beratkan pada sudut pandang kedua negara mengapa memilih bergabung dengan Tiongkok. Sedangkan dalam penelitian ini membahas sudut pandang Tiongkok dalam upayanya menarik dan kaitanya dengan prinsip satu Tiongkok, jurnal ini disertakan untuk mendukung fakta bahwa Tiongkok berusaha membuat Taiwan benar-benar terikat salah satunya dengan para pengusaha.

Terdapat sebuah jurnal yang berjudul *Taiwan's Perspective on China's "One Road" Strategy*. Terdapat pandangan strategi Tiongkok dengan adanya *The Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Pentingnya menjadi anggota pendiri AIIB adalah negara yang ikut serta akan menerima hak untuk memiliki suara yang lebih banyak dari pada negara lain yang kemudian berinvestasi di AIIB. Hal ini akhirnya membentuk ambisi Taiwan untuk bergabung dengan

tujuan menjadi ekonomi yang cukup memiliki *power* di Asia. Akan tetapi Taiwan bukan merupakan negara yang benar-benar diakui kedaulatannya maka dari itu Taiwan diijinkan oleh Tiongkok menggunakan namanya untuk bergabung (Hsueh, 2017).

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah jurnal hanya membahas mengenai AIIB secara mendalam dan hanya beberapa bagian dikaitkan dengan prinsip satu Tiongkok. Sedangkan penelitian ini hanya melihat sudut pandang antar selat. Penulis mengambil referensi dari jurnal tersebut hanya ingin memberikan gambaran bahwa upaya ekonomi langsung Tiongkok bisa dalam bentuk negosiasi langsung dengan latar ekonomi antara keduanya.

Dari sebuah jurnal berjudul *Constructing Peaceful Development: The Changing Interpretations of "One China" and Beijing's Taiwan Strait Policy*, Terdapat argumen bahwa Tiongkok kemudian menggunakan instrumen ekonomi sebagai cara yang utama untuk membujuk Taiwan. Serta secara tidak langsung membuat Taiwan semakin bergantung akan pasar Tiongkok setelahnya perlahan akan dipromosikan konsep persatuan kepada Taiwan. Tiongkok berusaha menjelaskan imbalan yang menguntungkan kepada Taiwan secara terorganisir dalam tindakan politik yang rasional karena keduanya memiliki peraturan hukum masing-masing (P.Chen, 2014).

Dalam jurnal membahas tentang hubungan antar selat dengan menggunakan konsep konstruktivisme dalam melihat pola pandangan Tiongkok terhadap Taiwan dan sebaliknya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan

konsep *Rational Actor Models*. Maka dari itu penelitian ini dirasa berbeda dan jurnal hanya dijadikan data pendukung.

Dari sebuah buku berjudul ini *Dangerous Strain The U.S –Taiwan – China Crisis*, Taiwan memiliki perusahaan semikonduktor yaitu *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)* yang menguasai pasar semikonduktor dunia. Dalam sebuah prediksi dalam kurun waktu sepuluh tahun Taiwan akan mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan semikonduktor pada posisi kedua di dunia, hal ini menuntut TSMC harus memiliki fasilitas produksi yang lebih baik. Alasan inilah yang kemudian membuat Taiwan memindahkan TSMC ke Tiongkok karena perusahaan pengemasan dan pengujian nomor satu di Tiongkok menawarkan kepada Taiwan untuk diijinkan melakukan pengujian pasca produksi dan fasilitas pengemasan sebagai bentuk kelonggaran yang diberikan Tiongkok (Tucker, 2005).

Jurnal cenderung membahas terkait dengan polemik ekonomi yang dialami internal Taiwan yang berkaitan dengan prinsip satu Tiongkok yang mengartikan penulis membahas perspektif Taiwan terkait dengan ekonominya. Sedangkan dalam penelitian ini melihat perspektif Tiongkok mengapa jalur ekonomi adalah strategi yang difokuskan dalam mencapai prinsip satu Tiongkok. Data tersebut dicantumkan untuk memberikan gambaran bahwa banyak jalur ekonomi yang dipilih Tiongkok termasuk dalam hubungan dengan perusahaan Taiwan.

1.7 Landasan Konseptual

Rational Actor

Model ini membahas terkait dengan apa saja tindakan aktor beserta pilihan yang dipilih yang sesuai dengan pola perilaku, pemilihan suatu kebijakan adalah untuk mencapai suatu tujuan atau kekuatan yang dititik beratkan pada pilihan negara dan merupakan langkah yang dirasa masuk akal untuk menaklukkan aliansi. Asumsi perilaku rasional bukan hanya suatu kebijakan yang cerdas serta adanya hubungan internasional melainkan lebih kepada perhitungan keuntungan yang akan didapatkan serta pertimbangan internal suatu negara dengan aktor pemerintah nasional. Komponen dari model ini merupakan respon terorganisir untuk suatu masalah strategis serta melihat tujuan pemerintah dan konsekuensi yang dipertimbangkan (Alisson, 1969). Terdapat 4 point dalam *Rational Actor models* sebagai berikut :

1. *Goals and Objectives*

Tujuan utama dari model ini adalah keamanan nasional, maka segala strategi yang dibentuk memiliki tujuan nasional didalamnya, dalam tahap ini akan dilihat tujuan apa saja yang ingin dicapai dari pembuatan kebijakan dan konsekuensi apa yang akan didapatkan sesuai dengan kebijakan yang dipilih. Dalam melihat tujuan suatu aktor yang harus diperhatikan adalah keuntungan yang akan diperoleh, kegunaan atau preferensi. Dari hal tersebut pembuat kebijakan akan memiliki gambaran konsekuensi apa saja yang kemudian bisa terjadi apa bila memilih suatu kebijakan tertentu.

2. *Alternatives*

Para pembuat kebijakan memilih satu alternatif yang tersedia yang sebelumnya dari beberapa varian pilihan yang telah dianalisis secara mendalam. Kebijakan yang kemudian dipilih adalah kebijakan yang paling tepat dan mendekati tujuan suatu negara. Setelahnya muncul analisis yang spesifik yang kemudian membedakan alternatif yang dipilih dengan alternatif lainnya yang di rasa dapat digunakan untuk mencapai kepentingan negara.

3. *Consequences*

Setiap tindakan yang dilakukan menimbulkan banyak varian hasil yang stokastik serta tidak dapat ditentukan dengan mudah, apakah hal tersebut merupakan peluang atau tidak, hal ini yang kemudian digunakan untuk memprediksi respon apa yang akan diberikan. Dalam tahap ini setiap alternatif-alternatif dianalisis hambatan serta manfaat yang akan didapatkan. Maka akan menimbulkan varian asumsi yang berbeda-beda. Akan ada penentuan konsekuensi oleh pembuat kebijakan yaitu *costs* dan *benefits* yang sesuai dengan tujuan dari suatu masalah.

4. *Choice*

Pembuat kebijakan akan memilih satu alternatif dengan konsekuensi yang paling diutamakan dalam hal mencapai sasaran dan tujuan. Pembuat kebijakan akan melihat konsekuensi yang telah dianalisis secara mendalam sehingga kebijakan yang dipilih merupakan yang paling dirasa tepat untuk suatu masalah tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu model dalam tulisan Alisson yaitu *Rational Actors Models* yang dianggap lebih tepat karena model ini memfokuskan pada rasionalitas melihat pertimbangan aktor serta konsekuensi apa yang akan dialami dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di suatu negara, model ini dirasa cocok untuk menjelaskan bagaimana upaya Tiongkok dalam memfokuskan langkah ekonomi sebagai usaha yang ditempuh untuk mempersatukan kembali wilayahnya dengan wilayah Taipei yang ditempati oleh Taiwan saat ini.

Model ini dirasa lebih dapat menjawab pertanyaan penelitian melihat dari tujuan kebijakan ekonomi Tiongkok yang berfokus dalam pencapaian prinsip satu Tiongkok yang merupakan tujuan nasional dari semua pemerintahnya. Serta mengapa Tiongkok justru memudahkan Taiwan dalam mendapatkan keuntungan dan akses pasar yang mudah didalam negerinya jika tidak diiringi dengan tujuan rasional atau nasionalnya. Maka hal ini dikatakan sebagai biaya konsekuensi dari *Rational actor models* secara lebih mendalam menjelaskan material baik dana, kebijakan khusus yang harus diberikan, lahan dan pembagian keuntungan pada Taiwan.

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan jenis penelitian metode kualitatif untuk melakukan analisis dengan pendekatan deskriptif, dalam tulisan

ini sebagai tinjauan sumber penelitian akan menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis akan menggunakan data sekunder. Di mana melakukan analisis pada sumber-sumber seperti dokumen-dokumen, website resmi serta buku yang akan dijadikan tinjauan dengan metode kualitatif yang telah dipaparkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu mengapa Republik Rakyat Tiongkok memfokuskan upaya kerja sama ekonomi antar selat dalam mendorong prinsip satu Tiongkok dalam penyatuan wilayah dengan Taiwan tahun 2010.

